

---

**Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah  
(Studi Kasus Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020)**

**Rahmi Safitri\*, Yunita Sopian**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

\*[safitrirahmi2@gmail.com](mailto:safitrirahmi2@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this study is to explore how the role of the Mineral and Coal General Mining Revenue Sharing Fund includes Fixed Contributions (Landrent) and Exploration and Exploitation Contributions (Royalty) to Regional Income, Regional Spending and Balance Fund of South Kalimantan Province Minerba Producing Regency from 2016-2020. This research uses contribution analysis measuring instruments that are quantitative descriptive. The data used is secondary time series data (time series). The results showed that the study of the contribution of Fixed Contributions (Landrent) to the APBD balance fund of all Minerba Producing Regencies in South Kalimantan Province showed a lack of category. On average, the gift of Exploration and Exploitation Contributions (Royalty) to the balance fund and APBD of Minerba Producing Regency in South Kalimantan Province shows that diverse categories tend to be quite good. At the same time, the regency that is very dependent is the Regency.*

**Keywords:** *Contributions, Mineral and Coal General Mining Revenue Sharing Fund, Fixed Contributions (Landrent), Exploration and Exploitation Contributions (Royalty).*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana peranan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara meliputi Iuran Tetap (*Landrent*) dan Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Dana Perimbangan Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan alat ukur analisis kontribusi yang bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* (runtut waktu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) terhadap dana perimbangan APBD semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kategori sangat kurang. Sedangkan kontribusi Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap dana perimbangan dan APBD Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata menunjukkan kategori beragam cenderung cukup baik, adapun Kabupaten yang sangat bergantung adalah Kabupaten Balangan.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara, Iuran Tetap (*Landrent*), Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (*Royalty*)

**PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam mengelola perekonomiannya secara efisien dan efektif guna kemajuan pembangunan serta kesejahteraan daerah. Pembangunan daerah dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan sentralisasi dan juga pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi yaitu perwujudan pembangunan sepenuhnya wewenang oleh pusat dan dilaksanakan oleh aparat yang ada di

pusat. Sedangkan desentralisasi berarti perwujudan pembangunan daerah dilakukan melalui desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*). Salah satu bentuk pendanaan desentralisasi yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Mekanisme pembagian DBH memiliki tujuan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal daerah dengan pemerintah pusat (*vertikal fiscal imbalance*).

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga berbagai investor dari luar negeri maupun dalam negeri datang ke tanah air untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk kekayaan sumber daya alam di Indonesia adalah potensi sumber daya mineral yaitu batubara yang merupakan bahan galian golongan C sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber daya alam ini memiliki cadangan potensi terbesar serta memberikan kontribusi riil untuk perekonomian Republik Indonesia. Batubara memiliki potensi cadangan sekitar 36,27 miliar ton (Ningrum, N.S., Santoso, B, 2009). Penggunaan batubara didalam negeri biasanya digunakan untuk sektor tenaga listrik, sisanya digunakan sebagai bahan baku di industri semen, tekstil, pupuk, metalurgi dan lain sebagainya. Peningkatan produksi batubara dari tahun ke tahun membuat batubara menjadi komoditi utama dalam subsektor pertambangan umum serta menempati posisi yang sangat baik serta merupakan sumber energi primer untuk beberapa sektor industri di Indonesia (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013).

Salah satu daerah penghasil batubara yang cukup besar di Indonesia adalah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan Timur. Tercatat di tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan masih di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 18,29% sumbangnya atas PDRB. Hal ini menggambarkan bahwa Kalimantan Selatan masih mengandalkan sektor tambang sebagai sektor unggulan. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari 13 kabupaten dan kota. Dimana dari 13 kabupaten dan kota tersebut hanya 8 Kabupaten yang memiliki kontribusi akan sektor tambang. Dengan potensi kontribusi sektor tambang tersebut maka penyaluran Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dapat disalurkan. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara berasal dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) dan Iuran Eksploitasi/Eksplorasi (*Royalty*) yang di Transfer ke Daerah dengan persentase tertentu. Terkait dengan potensi yang disumbangkan oleh sektor tambang tersebut diharapkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendanaan desentralisasi Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

Pokok-pokok masalah yang ingin dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral Dan Batubara terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2016-2020

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Hasil Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Pendanaan Desentralisasi terkait peranan

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dalam sumbangannya terhadap Dana Perimbangan serta Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2016-2020.

### **PENELITIAN TERDAHULU**

Riya Dwi Handaka (2017) meneliti tentang analisis peranan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagai pendaan desentralisasi menggunakan analisis *trend* dan analisis kontribusi untuk mengetahui peran nya terhadap pendanaan desentralisasi. Dengan analisis tersebut dapat diketahui bahwa dari analisis *trend* yang dilakukan terjadi pertumbuhan yang fluktuatif atas pragnosa alokasi dan realisasi baik DBH SDA minyak bumi maupun DBH SDA gas bumi secara nasional dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016. Sedangkan berdasarkan analisis kontribusi, secara agregat untuk tahun 2011-2016 DBH SDA Migas memiliki presentase kontribusi terhadap Dana Perimbangan yang masuk dalam kluster 10%-20% dan 0%-10% yang artinya kurang hingga sangat kurang kontribusinya terhadap pendanaan pengurangan ketidakseimbangan fiskal melalui dana perimbangan. Sedangkan kontribusi DBH SDA Migas terhadap APBD, masuk dalam kluster 0%-10% yang artinya sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan dan belanja daerah secara nasional. Selain itu tingkat kontribusi baik terhadap dana peimbangan dan APBD dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang negatif.

Mandala Harefa (2018) meneliti tentang hubungan dana bagi hasil dengan penerimaan daerah dan kemiskinan di provinsi kalimantan timur menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

### **METODE**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerimaan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang meliputi iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*), baik secara pragnosa/rencana maupun realisasinya untuk melihat bagaimana peranannya terhadap dana perimbangan, pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder *time series* (runtut waktu) yang di peroleh dari instansi terkait yaitu Badan

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara yaitu melalui 1) *Study* pustaka yaitu dengan *searching* data-data yang berhubungan, serta mempelajari jurnal yang berhubungan dan relevan dengan penelitian. 2) Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data hasil publikasi yang berbentuk dokumen tertulis maupun elektronik melalui hasil publikasi dari instansi-instansi tertentu.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan metode Analisis Kontribusi. Analisis Kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang meliputi iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap Dana Perimbangan serta APBD Kabupaten penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016-2020, dengan satuan yang digunakan adalah dalam bentuk Persen (%). Untuk menghitung besarnya kontribusi DBH terhadap dana perimbangan serta APBD, secara sistematis menggunakan formula yang terdapat dalam (Handaka R. D., 2017) yang disesuaikan dengan penelitian ini :

$$\text{Kontribusi DBH} = \frac{\text{Bagi Hasil DBH SDA Landrent atau Royalti Minerba}}{\text{Total Daper, Pendapatan atau Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai Kontribusi dari DBH *Landrent* dan *Royalty* Pertambangan Umum terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan serta Belanja Daerah, didasarkan pada kriteria Kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri UGM (1991) dalam (Handaka R. D., 2017), terdapat klasifikasi kriteria kontribusi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1  
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Nilai	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
3,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

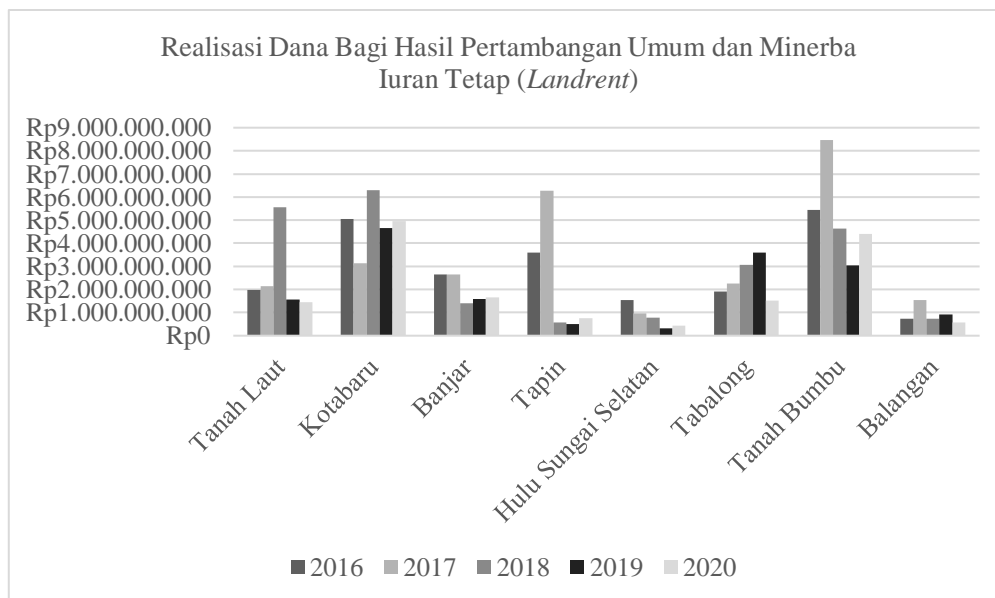
Sumber : Tim Litbang Depdagri UGM (1991)

## HASIL DAN ANALISIS

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang meliputi iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) diharapkan dapat memberikan kontribusi riil bagi perekonomian daerah terutama bagi Kabupaten yang menjadi daerah penghasil minerba tersebut. Mengingat dengan penggunaan yang tepat dan peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara diharapkan dapat berpengaruh dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah nya.

Gambar 1 dapat menjelaskan bagaimana perkembangan realisasi iuran tetap (*landrent*) pada Kabupaten Penghasil minerba di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan gambar 1

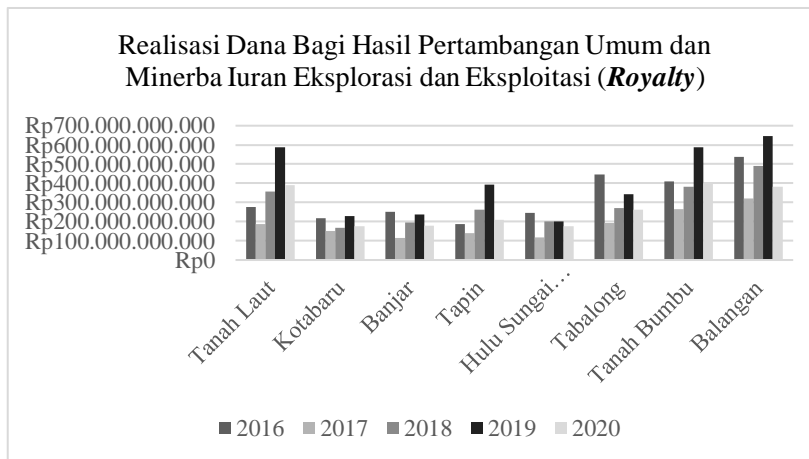
tersebut dapat terlihat bahwa realisasi iuran tetap (*landrent*) pada Kabupaten Penghasil minerba mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan yang beragam namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Adapun Kabupaten yang memiliki rata-rata realisasi iuran tetap (*landrent*) paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Balangan. Sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata nilai realisasi iuran tetap (*landrent*) paling tinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.



**Gambar 1. Realisasi Iuran Tetap (*Landrent*) Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan, 2016-2020**

Sumber : Bakeuda Prov. Kalimantan Selatan, Diolah Kembali

Sedangkan untuk data realisasi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan oleh gambar 2. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan yang beragam dari tahun 2016-2020. Adapun Kabupaten yang memiliki rata-rata nilai realisasi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru. Sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata nilai realisasi paling tinggi adalah Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.



**Gambar 2. Realisasi Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (*Royalty*) Kabupaten Penghasil Minerba**

**Provinsi Kalimantan Selatan, 2016-2020**

Sumber : Bakeuda Prov. Kalimantan Selatan, Diolah Kembali

Pertumbuhan realisasi ini dipengaruhi oleh adanya pragnosa DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang dianggarkan maupun direalisasikan dalam APBN tidak menentu karena bergantung dengan adanya ketidakpastian asumsi makro APBN yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga acuan komoditi tambang, keadaan suatu negara, selain itu juga dapat dipengaruhi oleh kualitas produksi tambang yang bisa mempengaruhi nilai jual komoditi tambang maupun faktor internal dan eksternal yang terjadi di lapangan. Terkait melemahnya nilai tukar rupiah dan lesunya perekonomian dunia akibat adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia juga menyebabkan terjadinya penurunan terhadap PNBPN SDA yang berimbas pada penurunan penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batubara. Secara agregat, menguatnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga batubara dan mineral, meningkatnya potensi batubara dan mineral akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor PNBPN SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dan berkorelasi positif terhadap peningkatan DBH SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dan centeris paribus.

**Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Dana Perimbangan**

**Tabel 2 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) terhadap Dana Perimbangan per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan**

Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba ( <i>Landrent</i> ) terhadap Dana Perimbangan Daerah								
Rank	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Keterangan
1	Tanah Bumbu	0,50%	1,00%	0,44%	0,21%	0,31%	<b>0,49%</b>	Sangat Kurang
2	Kotabaru	0,47%	0,28%	0,63%	0,42%	0,45%	<b>0,45%</b>	Sangat Kurang
3	Tapin	0,41%	0,85%	0,06%	0,05%	0,07%	<b>0,29%</b>	Sangat Kurang
4	Tabalong	0,15%	0,25%	0,33%	0,33%	0,14%	<b>0,24%</b>	Sangat Kurang
5	Tanah Laut	0,20%	0,23%	0,47%	0,11%	0,10%	<b>0,22%</b>	Sangat Kurang
6	Banjar	0,21%	0,25%	0,12%	0,12%	0,13%	<b>0,17%</b>	Sangat Kurang
7	Balangan	0,06%	0,18%	0,07%	0,08%	0,05%	<b>0,09%</b>	Sangat Kurang
8	Hulu Sungai Selatan	0,14%	0,12%	0,08%	0,03%	0,04%	<b>0,08%</b>	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 2 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata yang dihasilkan menunjukkan bahwa kontribusi iuran tetap (*landrent*) terhadap Dana Perimbangan semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata masuk ke dalam kategori sangat kurang di karenakan angka persentasenya ada pada rentang 0,00% -10,00%. Dapat diartikan bahwa iuran tetap (*Landrent*) Kabupaten tersebut memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa Iuran Tetap (*Landrent*) dalam DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara masih sangat kurang berperan dalam Dana Perimbangan. Dimana Kabupaten-Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan harus mencari sumber pendanaan lain yang bisa mencukupi pengeluaran pemerintah daerah serta meningkatkan potensi lainnya yang ada didaerah masing-masing.

Sedangkan untuk analisis kontribusi pada iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap dana perimbangan Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

**Tabel 3 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Dana Perimbangan per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (<i>Royalty</i>) terhadap Dana Perimbangan Daerah</b>								
<b>Rank</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Balangan</b>	47,90%	38,35%	48,61%	53,86%	47,38%	<b>47,22%</b>	<b>Baik</b>
<b>2</b>	<b>Tanah Bumbu</b>	37,73%	31,22%	35,88%	41,08%	37,25%	<b>36,63%</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>3</b>	<b>Tanah Laut</b>	27,45%	20,49%	30,30%	41,27%	35,31%	<b>30,96%</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>4</b>	<b>Tabalong</b>	34,99%	21,29%	29,30%	31,01%	26,76%	<b>28,67%</b>	<b>Sedang</b>
<b>5</b>	<b>Tapin</b>	21,32%	19,18%	29,11%	36,93%	24,93%	<b>26,29%</b>	<b>Sedang</b>
<b>6</b>	<b>Hulu Sungai Selatan</b>	22,81%	14,37%	21,21%	19,07%	20,49%	<b>19,59%</b>	<b>Kurang</b>
<b>7</b>	<b>Kotabaru</b>	20,30%	13,70%	16,69%	20,80%	18,08%	<b>17,91%</b>	<b>Kurang</b>
<b>8</b>	<b>Banjar</b>	19,91%	10,70%	16,10%	18,71%	16,05%	<b>16,29%</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 3 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata yang dihasilkan menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan termasuk kategori kurang dengan rentang 10,10% - 20. Sedangkan Kabupaten yang memiliki kategori kontribusi sedang adalah Kabupaten Tapin dan Tabalong dengan rentang persentase 20,10% - 30. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut dan Tanah bumbu memiliki persentase rata-rata masing-masing sebesar 30,96% dan 36,63% dengan kategori cukup baik karena berada di rentang 30,10% - 40. Sedangkan Kabupaten dengan persentase rata-rata tertinggi yaitu dengan persentase sebesar 47,22% atau termasuk kategori baik adalah Kabupaten Balangan. Dengan persentase sebesar itu, Kabupaten Balangan masih sangat bergantung akan pendapatan transfer dari pusat berupa pendapatan yang dihasilkan dari pertambangan umum yaitu DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara lebih tepatnya ketergantungan atas Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) sebagai sumber pendanaan sektor publik nya.

## Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 4 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) terhadap Pendapatan Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan

Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba ( <i>Landrent</i> ) terhadap Pendapatan Daerah								
Rank	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Keterangan
1	Tanah Bumbu	0,37%	0,64%	0,33%	0,15%	0,27%	<b>0,35%</b>	Sangat Kurang
2	Kotabaru	0,36%	0,24%	0,44%	0,29%	0,33%	<b>0,33%</b>	Sangat Kurang
3	Tapin	0,32%	0,65%	0,05%	0,04%	0,06%	<b>0,22%</b>	Sangat Kurang
4	Tanah Laut	0,15%	0,16%	0,37%	0,10%	0,09%	<b>0,17%</b>	Sangat Kurang
5	Tabalong	0,12%	0,18%	0,23%	0,23%	0,10%	<b>0,17%</b>	Sangat Kurang
6	Banjar	0,16%	0,16%	0,08%	0,08%	0,09%	<b>0,11%</b>	Sangat Kurang
7	Balangan	0,05%	0,14%	0,06%	0,06%	0,05%	<b>0,07%</b>	Sangat Kurang
8	Hulu Sungai Selatan	0,11%	0,09%	0,06%	0,02%	0,03%	<b>0,06%</b>	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 4 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata yang dihasilkan menunjukkan bahwa kontribusi iuran tetap (*landrent*) terhadap Pendapatan Daerah semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata masuk ke dalam kategori sangat kurang di karenakan angka persentasenya berada di rentang 0,00% -10,00%. Dapat diartikan bahwa iuran tetap (*Landrent*) Kabupaten tersebut memiliki peran yang sangat kurang terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata. Maka dari itu dengan melihat kontribusi tersebut, daerah kabupaten penghasil Minerba harus mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi penerimaan diluar DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khusus nya pendapatan Iuran Tetap (*Landrent*).

Sedangkan untuk analisis kontribusi pada iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel 5 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Pendapatan Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan

Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba ( <i>Royalty</i> ) terhadap Pendapatan Daerah								
Rank	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Keterangan
1	Balangan	40,36%	28,98%	38,24%	42,74%	32,69%	<b>36,60%</b>	Cukup Baik
2	Tanah Bumbu	27,97%	19,91%	27,21%	29,18%	25,17%	<b>25,89%</b>	Sedang
3	Tanah Laut	21,20%	14,41%	23,65%	37,76%	24,17%	<b>24,24%</b>	Sedang
4	Tabalong	27,75%	15,22%	20,60%	21,48%	17,54%	<b>20,52%</b>	Sedang
5	Tapin	16,88%	14,61%	22,93%	27,38%	17,54%	<b>19,87%</b>	Kurang
6	Hulu Sungai Selatan	17,30%	10,38%	15,33%	13,51%	13,09%	<b>13,92%</b>	Kurang
7	Kotabaru	15,32%	11,57%	11,65%	14,43%	11,87%	<b>12,97%</b>	Kurang
8	Banjar	15,49%	7,10%	11,12%	12,54%	10,12%	<b>11,27%</b>	Kurang

Sumber: Hasil Olah Data



Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 5 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penghasil Minerba mempunyai kategori yang beragam. Adapun Kabupaten yang memiliki kategori kontribusi terendah adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin karena kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Pendapatan Daerah nya termasuk kedalam kategori yang kurang dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 11,27%, 12,97%, 13,92% dan 19,87% secara rata-rata. Selanjutnya kabupaten yang memiliki kategori kontribusi sedang yaitu kabupaten Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 20,52%, 24,24%, dan 25,89% secara rata-rata. Sedangkan daerah yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Balangan dengan persentase kontribusi yang termasuk kedalam kluster 30,10% - 40,00% yang artinya kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan dalam kategori cukup baik atau dengan angka 36,60%. Maka, untuk daerah yang masih dalam kategori kontribusi kurang maupun sedang, sangat disarankan untuk mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi kekayaan daerah lain selain DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khususnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) agar dapat mencukupi kebutuhan dan pengeluaran daerahnya.

### Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Belanja Daerah

Tabel 6 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) terhadap Belanja Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan

Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba ( <i>Landrent</i> ) terhadap Belanja Daerah								
Rank	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Keterangan
1	Tanah Bumbu	0,39%	0,64%	0,37%	0,19%	0,26%	<b>0,37%</b>	Sangat Kurang
2	Kotabaru	0,33%	0,23%	0,44%	0,29%	0,36%	<b>0,33%</b>	Sangat Kurang
3	Tapin	0,31%	0,62%	0,05%	0,05%	0,07%	<b>0,22%</b>	Sangat Kurang
4	Tabalong	0,15%	0,18%	0,25%	0,26%	0,11%	<b>0,19%</b>	Sangat Kurang
5	Tanah Laut	0,11%	0,14%	0,41%	0,12%	0,11%	<b>0,18%</b>	Sangat Kurang
6	Banjar	0,17%	0,16%	0,10%	0,10%	0,11%	<b>0,13%</b>	Sangat Kurang
7	Balangan	0,06%	0,12%	0,06%	0,08%	0,05%	<b>0,07%</b>	Sangat Kurang
8	Hulu Sungai Selatan	0,12%	0,08%	0,06%	0,03%	0,04%	<b>0,07%</b>	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 6 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) terhadap Belanja Daerah semua Kabupaten Penghasil Minerba mempunyai kategori yang secara rata-rata masuk ke dalam kategori sangat kurang di karenakan angka persentasenya ada pada rentang 0,00% - 10,00%. Yang artinya kontribusi Iuran Tetap (*Landrent*) semua Kabupaten Penghasil Minerba memilki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap Belanja Daerah. Maka dari itu dengan melihat kontribusi nya dari tahun ke tahun, daerah kabupaten penghasil Minerba harus mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi penerimaan diluar DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khusus nya pendapatan Iuran Tetap (*Landrent*) untuk mencukupi pembiayaan serta Belanja Daerah guna menunjang kesejahteraan daerah.

Sedangkan untuk analisis kontribusi pada iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap belanja daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

**Tabel 7 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Belanja Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan**

Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba ( <i>Royalty</i> ) terhadap Belanja Daerah								
Rank	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Keterangan
1	Balangan	47,60%	25,71%	40,18%	56,40%	33,24%	<b>40,63%</b>	<b>Baik</b>
2	Tanah Bumbu	29,61%	20,07%	30,79%	36,04%	23,80%	<b>28,06%</b>	<b>Sedang</b>
3	Tanah Laut	15,96%	12,03%	26,43%	45,61%	30,10%	<b>26,03%</b>	<b>Sedang</b>
4	Tabalong	34,01%	15,64%	21,99%	25,18%	19,07%	<b>23,18%</b>	<b>Sedang</b>
5	Tapin	16,16%	13,92%	24,80%	40,37%	19,42%	<b>22,93%</b>	<b>Sedang</b>
6	Hulu Sungai Selatan	18,51%	9,84%	15,93%	16,73%	15,66%	<b>15,33%</b>	<b>Kurang</b>
7	Kotabaru	14,24%	11,07%	11,62%	14,58%	12,74%	<b>12,85%</b>	<b>Kurang</b>
8	Banjar	15,91%	7,00%	13,93%	15,07%	12,06%	<b>12,79%</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 7 pengamatan 2016-2020 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Penghasil Minerba mempunyai kategori yang beragam. Adapun Kabupaten yang memiliki kategori kontribusi terendah dibandingkan dengan kabupaten penghasil lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan karena kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Belanja Daerah nya termasuk kedalam kategori yang kurang karena nilai persentasenya berada di rentang 10,10% - 20,00% dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 12,79%, 12,85%, dan 15,34% secara rata-rata. Selanjutnya kabupaten yang memiliki kategori kontribusi sedang yaitu kabupaten Tapin, Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu karena nilai persentase kontribusinya berada di rentang 20,10% - 30,00% dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 22,93%, 23,18%, 26,02%, dan 28,06% secara rata-rata. Sedangkan daerah yang memiliki nilai kontribusi terbesar jika dibandingkan kabupaten penghasil minerba lain adalah Kabupaten Balangan dengan persentase kontribusi yang termasuk kedalam kluster 40,10% - 50,00% yang artinya kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Balangan dalam kategori baik atau dengan angka 40,63%. Maka, untuk daerah yang masih dalam kategori kontribusi kurang maupun sedang, sangat disarankan untuk mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi kekayaan lain selain DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khususnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*) agar dapat mencukupi kebutuhan dan pengeluaran daerahnya.

## PENUTUP

### Implikasi Penelitian

Kabupaten penghasil minerba masih bertopang pada pendapatan transfer yaitu DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khususnya pada iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) sebagai sumber pendapatan dan belanja utama dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Serta menunjukkan bahwa secara rata-rata Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi

Kalimantan Selatan telah mewujudkan konsep desentralisasi fiskal namun masih belum terjadi kemandirian keuangan di Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan capaian kontribusi tersebut diharapkan Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi riil daerah nya masing-masing dengan meningkatkan PAD daerahnya agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kontribusi iuran tetap (*landrent*) semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peranan yang sangat kurang dalam sumbangan nya terhadap dana perimbangan, pendapatan dan belanja daerah karena berada di rentang 0,00% - 10,00%. Sedangkan untuk kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap Dana Perimbangan menunjukkan bahwa secara rata-rata ada 3 Kabupaten peran nya kurang yaitu Kabupaten Banjar, Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan atau di rentang 10,10% - 20,00%, untuk Kabupaten yang memiliki rata-rata kontribusi sedang yaitu Kabupaten Tapin dan Tabalong di rentang 20,10% - 30,00%, Selanjutnya untuk Kabupaten yang kategori nya cukup baik adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut direntang 30,10% - 40,00%, dan Kabupaten yang kategori kontribusi nya baik adalah Kabupaten Balangan di rentang 40,10% - 50,00%. Sedangkan hasil analisis kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten yang rata-rata kategori kontribusi kurang adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin di rentang 10,10% - 20,00%, sedangkan Kabupaten yang kategori kontribusi nya sedang adalah Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, dan Kabupaten yang kategori kontribusi rata-rata paling tinggi adalah Kabupaten Balangan dengan kategori cukup baik di rentang 30,10% - 40,00%. Untuk hasil analisis kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten yang rata-rata kategori nya kurang adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan atau di rentang 10,10% - 20,00%, sedangkan kategori kontribusi sedang adalah Kabupaten Tapin, Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu atau di rentang 30,10% - 40,00%, dan kabupaten yang kategorinya tertinggi masih di capai oleh Kabupaten Balangan dengan kategori baik atau di rentang 40,10% - 50,00%.

### **Saran**

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah 1) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar meningkatkan kerjasama baik dengan perusahaan tambang dan instansi terkait (Pemerintah Daerah, BPKP, BPK, Kemdag, Kemkeu). 2) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah terkait agar melakukan pelaporan data secara jujur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan produksi bahan tambang mineral dan batubara dan peningkatan penerimaan DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara. 3) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar melakukan intensifikasi penagihan kewajiban keuangan (Iuran Tetap (*Landrent*), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*), dan DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara)). 4) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah

Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menggunakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dengan melihat prioritas daerah sehingga dapat berkorelasi langsung dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya angka kemiskinan di daerahnya. 5) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar mempertahankan potensi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang ada di daerahnya serta mencari dan menggali potensi sumber pendaan lain selain Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara agar terciptanya pertumbuhan Pendapatan Daerah. 6) Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah alat analisis yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 alat ukur analisis saja. 7) Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, R. (2013). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*, 1979, 1–26.
- Budiono. (2001). *Ekonomi Makro Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Dirjen Mineral dan Batubara. (2013). *Penggunaan Batubara*. Jakarta: Dirjen Mineral dan Batubara.
- Handaka, R. D. (2017). Analisis Peranan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai Pendanaan Desentralisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 31.
- Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9, 147-160.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ningrum, N.S., Santoso, B. (2009). Petrographyc Study On Genesis Of Selected Inertinite-Rich Coal From Jambi Subbasin. *Indonesian Mining Journal*, Vol. 12 No. 3.
- Ningsih, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar , Retribusi Parkir, dan Retribusi Tempat Pariwisata Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo (Studi Empiris Dinas Pendapatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2019). *Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Sun'an, M. &. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahyuni, P. H. (2009). Analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah. *The 3rd National Confeence UKWMS*, (32), 1-23.